



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

#bangga
melayani BerAKHLAK
— semangat Pelayanan — kualitas — integritas —
— harmonis — loyal — disiplin — profesional

2024

LAPORAN KINERJA



Author:

BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA

LAPORAN KINERJA 2024

**BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN
DAN WISMA**

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA

NIP.196811251993022001

TIM PENYUSUN

PENGARAH

SATYANTO PRIAMBODO, S.E., M.SI.

PENANGGUNG JAWAB

BUDIYARTO, S.AP., M.AP.

KETUA

ADANG FIRMASNYAH, S.P., M.AP.

WAKIL KETUA

SRI MURTI NARDANI, S.E.

SEKRETARIS

DINA KHAIRANI, S.T.

ANGGOTA

EKO RISWANTO, S.E., M.AP.

WALUYO, S.E., M.AP.

ENDANG KOMAR, S.T., M.T.

FIROSA SIREZIA, S.E., M.M.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan dari komitmen kami untuk mewujudkan nilai-nilai **BerAKHLAK** dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat **Berorientasi Pelayanan**, kami telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Melalui kerja keras dan **kompetensi** yang dimiliki, kami telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. **Akuntabilitas dan transparansi** menjadi prinsip utama dalam penyusunan laporan ini, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi seluruh pihak. Semangat **harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif** telah mendorong kami untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Secara umum, pada Tahun 2024, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan sangat baik, disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien.



Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang tinggi. Berkat kontribusi bersama, kami berhasil mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan tugas, kami memegang teguh filosofi: **“Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, dan tanggung jawab tanpa harus diminta”**.

Kami berharap laporan kinerja tahun 2024 ini tidak hanya menjadi sarana pengukuran kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, tetapi juga berfungsi sebagai acuan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang guna mengoptimalkan layanan kepada DPR RI.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma
Sekretariat Jenderal DPR RI,



Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.
NIP. 19661008 199403 1 003



Daftar

Isi

**I**

PENDAHULUAN

1.1	Gambaran Umum	7
1.2	Dasar Hukum	8
1.3	Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	9
1.4	Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi	12

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis	13
2.2	Perjanjian Kinerja	16

III

AKUNTABILITAS KERJA

3.1	Capaian Kinerja	18
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
3.1.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya	19
3.1.3	Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah	20
3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	21
3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27
3.2	Realisasi Anggaran	28

IV

PENUTUP

4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	31

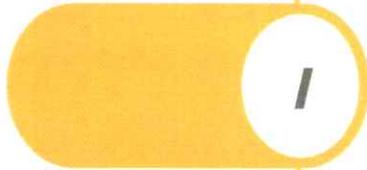


Daftar Tabel & Gambar



TABEL

- Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Setjen DPR RI tahun 2024 17
- Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro PBW Tahun 2024 18
- Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Biro PBW Tahun 2022, 2023, dan 2022 19
- Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 20
- Tabel 3.4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya 26
- Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Biro PBW Tahun 2024 28



GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma 12
- Gambar 2.1. Cascading Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2024 15



Executive Summary

Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 merupakan gambaran lengkap atas kinerja dari seluruh unit kerja di Lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan ini mencakup evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sepanjang Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran program/kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33	3,74	112,31%
		Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	96	87,24	90,88%
		Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99%	99,95%	100,96%

Sepanjang Tahun 2024, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil melaksanakan layanan kepada DPR RI dengan sangat baik. Secara umum, capaian sasaran program/kegiatan tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik, dengan capaian setiap indikator mencapai 3,74%. Tingkat keberhasilan ini setara dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.



Executive Summary



Pada Tahun 2024, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Setjen DPR RI berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Dari pagu anggaran yang telah dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 610. 631.187.000,-, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 610.362.279.754,- atau 99,95% dari total pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI.

Capaian ini menunjukkan bahwa Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Setjen DPR RI telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan sasaran strategis. Selain itu, realisasi kinerja anggaran juga selaras dengan pencapaian kinerja yang direncanakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Struktur organisasi baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (Biro PBW) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Biro PBW memegang peran strategis dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada Anggota Dewan. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro PBW berimplikasi langsung terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara menyeluruh. Laporan kinerja yang disusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI yang di dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya, Biro PBW menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan gedung dan instalasi, rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rumah jabatan Sekretaris Jenderal, serta wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Pengelolaan gedung dan instalasi;
4. Pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan rumah jabatan Sekretaris Jenderal;
5. Pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Penyusunan laporan kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro PBW didukung oleh bagian Gedung dan Instalasi, bagian Pengelolaan Rumah Jabatan, dan bagian Pengelolaan Wisma DPR yang ketiganya memiliki tugas dan fungsi berbeda.

Bagian Gedung dan Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gedung dan pertamanan serta melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi. Bagian Gedung dan Instalasi terdiri atas Sub Bagian Gedung dan Taman, Sub Bagian Elektrikal, dan Sub Bagian Mekanikal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Gedung dan Instalasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian Gedung dan Instalasi;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan pengoperasian instalasi;
3. Pengelolaan gedung dan pertamanan;
4. Pengoperasian mekanikal;
5. Pengoperasian elektrokal;
6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Gedung dan Instalasi; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

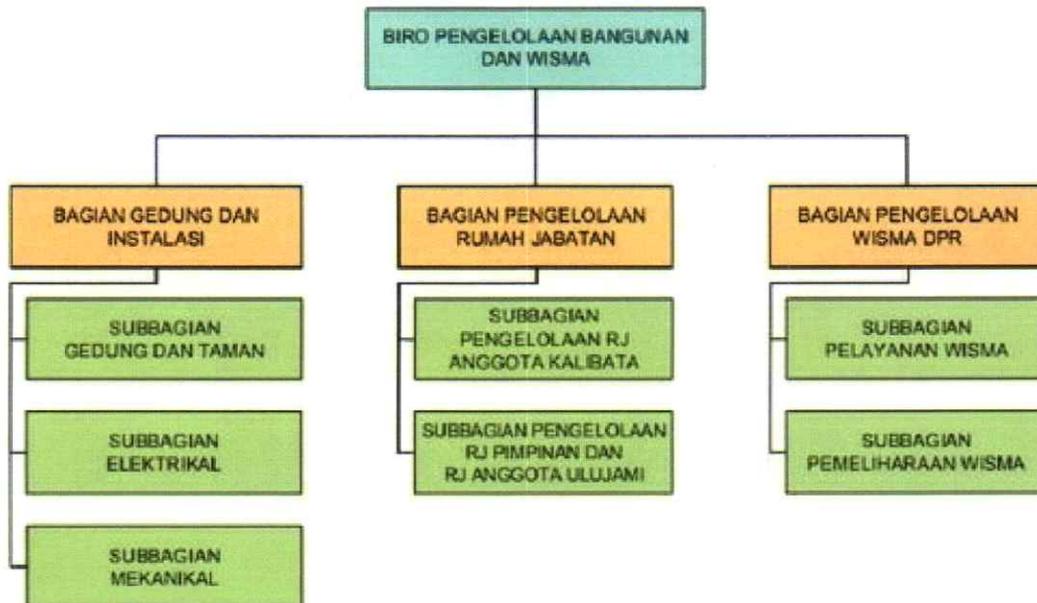
Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Sub Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota Ulujami.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan;
3. Pengelolaan rumah jabatan anggota di Kawasan Kalibata;
4. Pengelolaan rumah jabatan anggota di Kawasan Ulujami;
5. Pengelolaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal;
6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Bagian Pengelolaan Wisma DPR mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian Pengelolaan Wisma DPR terdiri atas Sub Bagian Pelayanan Wisma dan Sub Bagian Pemeliharaan Wisma. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Wisma DPR menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Wisma DPR;
2. Penyusunan bahan kegiatan dan anggaran di bidang wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR;
4. Pelaksanaan pelayanan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Pelaksanaan pemeliharaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.



Sumber: Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, Tahun 2024

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, antara lain:

1. Dinamika politik DPR RI yang sangat tinggi, memiliki implikasi pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dewan seperti ruang kerja, ruang rapat, hunian, dan fasilitas lainnya;
2. Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, agar sebanding dengan volume dan ritme kerja DPR RI serta peningkatan kompetensi SDM perlu dioptimalkan dalam rangka pengoperasian sarana dan prasarana pendukung kerja;
3. Tuntutan untuk melaksanakan sistem kerja adaptif dan kolaboratif, perlu didukung dengan peningkatan kemampuan melaksanakan kinerja (kapasitas) dan kecakapan/kapabilitas SDM yang perlu dioptimalkan;
4. Integrasi layanan sistem informasi perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan;
5. Budaya kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI perlu dioptimalkan;
6. Kebijakan *automatic adjustment* dan pemblokiran pada DIPA Tahun Anggaran 2024 memiliki dampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Proses ini dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan selaras dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Biro PBW untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Biro PBW pada Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 maupun Renstra Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Penyusunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yang terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024. Visi Setjen DPR RI, sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024, adalah:

“MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL YANG PROFESIONAL DAN MODERN DALAM MENDUKUNG VISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Setjen DPR RI menetapkan 3 (tiga) misi, antara lain:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih;
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Renstra Setjen DPR RI juga ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

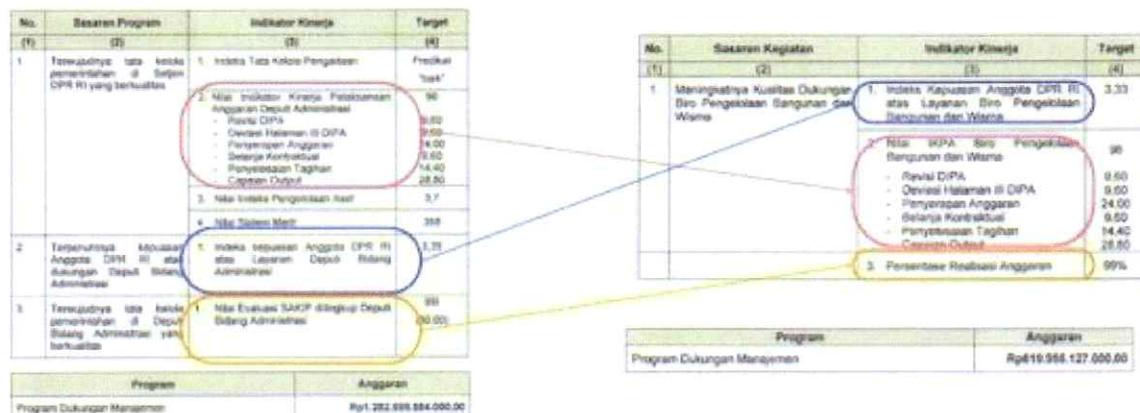
Sejalan dengan Renstra Setjen DPR RI tersebut, Deputi Bidang Persidangan menetapkan 3 (tiga) sasaran program antara lain:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas;
2. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas.

Adapun sasaran program Biro PBW mengacu pada Renstra Setjen DPR RI dan Renstra Deputi Bidang Administrasi. Pada tahun 2024, Biro PBW menetapkan sasaran program yaitu “Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma” yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja antara lain:

1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
2. Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
3. Presentase Realisasi Anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan *cascading* indikator kinerja Setjen DPR RI, Deputi Bidang Administrasi, dan Biro PBW.



Gambar 2.1. Cascading Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2024

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pelaksanaan kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (Biro PBW). Perjanjian Kinerja disusun untuk memastikan pelaksanaan kinerja di Biro PBW dapat lebih terarah dan terukur. Perjanjian ini juga dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja di Biro PBW telah disusun secara berjenjang, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, hingga level Pelaksana. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Perjanjian Kinerja untuk tingkat unit kerja Biro, Pusat, dan Inspektorat, khususnya pada Biro PBW, telah disusun dengan sasaran dan indikator yang berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian PAN RB yang menekankan bahwa kinerja dari unit Eselon II harus memberikan dampak (*impact*) bagi organisasi.

Perjanjian Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Setjen DPR RI disampaikan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Setjen DPR RI tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33
		2. Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	96
		- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80
		3. Persentase Realisasi Anggaran	99%

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro PBW Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target yang telah disusun. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama 1 (satu) tahun yaitu pagu anggaran di Perjanjian Kinerja Biro PBW sebesar Rp. 619.956.127.000,-. Namun pada pertengahan tahun 2024 karena adanya kebutuhan organisasi maka dilakukan penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp. 610.631.187.000,-.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro PBW Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33	3,74	112,31%
		Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	96	87,24	90,88%
		Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99%	99,95%	100,96%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun 2024 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari sasaran/tujuan Meningkatkan kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, dimana 2 (dua) indikator kinerja telah melampaui target yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (realisasi sebesar 112,31 %) dan Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (realisasi sebesar 100,96%). Namun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai 100% yaitu Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (realisasi sebesar 87,24%).

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Apabila disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, kinerja Biro PBW di tahun 2024 mengalami peningkatan (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Biro PBW Tahun 2022, 2023, dan 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	realisasi (%)	Target	Realisasi	realisasi (%)	Target	Realisasi	realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,07	3,27	106,51%	3,3	3,4	103,03%	3,33	3,74	112,31%
		Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	-	-	-	-	-	-	96	87,24	90,88%
		Persentase Realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	98,50	99,96	101, %	99	99,97	100,98%	99%	99,95	100,96%

Tabel diatas menyajikan evaluasi kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma selama beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tujuan utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana Biro PBW berhasil meningkatkan kualitas layanan dan mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Biro PBW. Analisis perbandingan capaian kinerja untuk Indikator kinerja Nilai IKPA pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dilakukan karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dimuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun, dari target Nilai IKPA sebesar 96 dan realisasi capaian 87,24 menunjukkan persentase realisasi anggaran cukup baik. Persentase realisasi anggaran untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh Biro PBW, dari data pada tabel terlihat bahwa Biro PBW telah berhasil mencapai dan bahkan melampaui target realisasi anggaran pada setiap tahunnya.

3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 - 2024, capaian yang diperoleh pada tahun 2024 telah melampaui target tersebut (Tabel 3.3.)

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,74	3,33	112,31%
		Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	87,24	-	-
		Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99,95%	-	-

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa Biro PBW telah berhasil melampaui target indeks kepuasan Anggota DPR RI dengan mencapai nilai 3,74, sementara target akhir jangka menengah yang ditetapkan adalah 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan Biro PBW kepada Anggota DPR RI telah meningkat dan berhasil memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi Anggota DPR RI. Untuk indikator kinerja Nilai IKPA dan Persentase Realisasi Anggaran, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah tidak dapat dilakukan dikarenakan kedua indikator tersebut belum terdapat pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020 - 2024.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, seluruh unit kerja yang berada di bawah koordinasi Biro PBW menjadi bagian dari pertanyaan survei yang diajukan ke Anggota DPR RI periode 2019-2024, Mitra Setjen DPR RI (Mitra K/L, Mitra Non K/L, Organisasi Berbadan Hukum, PNS, Swasta, PPNASN/TSP/TA/SAA, Lainnya), serta masyarakat secara umum. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kinerja layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal persyaratan memperoleh nilai indeks 3,766 atau nilai interval konversi 94,149 dengan kategori “Sangat Baik”.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam memberikan layanan mudah diikuti/dilakukan. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal sistem, mekanisme, dan prosedur memperoleh nilai indeks 3,749 atau nilai interval konversi 93,720 dengan kategori “Sangat Baik”.

3. Biaya / Tarif

Biaya/tarif yang ditetapkan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma pada layanan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal biaya/tarif memperoleh nilai indeks 3,718 atau nilai interval konversi 92,953 dengan kategori “Sangat Baik”.

4. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan dan kesetjenan DPR RI mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kepuasan Anggota DPR RI dan kesetjenan DPR RI atas pelayanan yang diterimanya. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal waktu penyelesaian memperoleh nilai indeks 3,792 atau nilai interval konversi 94,801 dengan kategori “Sangat Baik”.

5. Produk spesifikasi jenis layanan

Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma digunakan untuk mengukur kualitas dan ketepatan dalam memberikan pelayanan bagi Anggota DPR RI. Produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal produk spesifikasi jenis layanan memperoleh nilai indeks 3,725 atau nilai interval konversi 93,116 dengan kategori “Sangat Baik”.

6. Kompetensi SDM

Kompetensi SDM sebagai pelaksana layanan di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam memberikan layanan kepada Anggota DPR RI dan kesetjengan DPR RI memiliki karakteristik dalam hal kemampuan, pengetahuan, pengalaman, motivasi, komunikasi, dan kerjasama dalam lingkungan kerja. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal kompetensi SDM memperoleh nilai indeks 3,728 atau nilai interval konversi 93,207 dengan kategori “Sangat Baik”.

7. Perilaku SDM

Perilaku SDM Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI dan kesetjengan DPR RI dilakukan secara responsif, “dapat diandalkan” dan “memiliki etika pelayanan yang baik”. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal perilaku SDM memperoleh nilai indeks 3,761 atau nilai interval konversi 94,013 dengan kategori “Sangat Baik”.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, “saran” dan “masukan” dilakukan dengan menilai kecepatan SDM Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam merespon pengaduan, “saran” dan “masukan” yang datang dari Anggota DPR RI dan kesetjengan DPR RI. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses untuk menerima pengaduan, “saran” dan “masukan” yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dan kesetjengan DPR RI. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal penanganan pengaduan, “saran” dan “masukan” memperoleh nilai indeks 3,700 atau nilai interval konversi 92,491 dengan kategori “Sangat Baik”.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung layanan baik secara *offline* maupun *online* yang disediakan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memberikan kenyamanan dan mudah digunakan. Hal ini terlihat dari penilaian kelengkapan sarana dan prasarana yang berada di bawah tanggung jawab Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Hasil survei mengenai kinerja unit layanan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam hal sarana dan prasarana memperoleh nilai indeks 3,700 atau nilai interval konversi 92,500 dengan kategori “Sangat Baik”.

Apabila capaian kinerja kepuasan masyarakat terhadap kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma diurutkan berdasarkan unsur layanan yang memperoleh nilai interval konversi tertinggi hingga terendah. Maka dari sembilan unsur yang menjadi pertanyaan dalam kuesioner SKM, unsur waktu penyelesaian layanan memperoleh nilai interval konversi tertinggi, yaitu 94,801. Sedangkan unsur Pengaduan, Saran dan Masukan yang disediakan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memperoleh nilai interval konversi terendah yaitu 92,491.

Untuk analisis kegagalan indikator nilai IKPA Biro PBW tahun 2024, dimana target nilai IKPA sebesar 96% dan realisasi yang dicapai sebesar 87,24%, faktor penyebab kegagalan ini salah satunya adalah kegiatan tambahan di Biro PBW sebagai bentuk pelayanan kepada Dewan, dimana dengan anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran, Biro PBW harus berusaha mengakomodir seluruh kebutuhan Dewan melalui optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi anggaran. Untuk upaya solusi yang dilakukan Biro PBW dengan tetap melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran di setiap triwulan, memperkuat koordinasi dengan semua stakeholder Biro PBW untuk memastikan kelancaran kegiatan/program pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Analisis keberhasilan pencapaian target realisasi anggaran Biro PBW, dimana target realisasi anggaran tahun 2024 adalah 99% dan berhasil dicapai dengan realisasi 99,95%. Hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah dilakukannya evaluasi atas setiap kegiatan yang dikelola melalui capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan, perbaikan yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi di setiap unit kerja di lingkungan Biro PBW, dan komitmen dari seluruh pegawai di lingkungan Biro PBW untuk mencapai target kinerja merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian ini.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja Biro PBW. Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya tercermin dari pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, penggunaan sumber daya manusia yang terampil dan terorganisir dengan baik, serta pemanfaatan fasilitas dan waktu secara optimal, merupakan faktor utama yang mendukung efisiensi tersebut. Selain itu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan memainkan peran penting dalam menjaga serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di masa yang akan datang.

Biro PBW mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4. Biro PBW senantiasa meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang diberikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) berapa pun alokasi anggaran yang tersedia. Biro PBW menyadari bahwa kinerja yang diberikan menjadi cerminan wajah dari Setjen DPR RI. Biro PBW menganut prinsip “*your wish is my command*”. Apa yang menjadi harapan Anggota DPR RI menjadi suatu *mandatory* bagi Biro PBW.

Tabel 3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
Meningkatkannya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33	3,74	112,31	610.631.187.000	610.371.421.346	99,95	89,00 %
	Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	96	87,24	90,88	-	-	-	-
	Persentase Realisasi Anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	99	99,95	100,96	610.631.187.000	610.371.421.346	99,95	99,01 %

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.4, angka efisiensi tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja dibagi dengan capaian realisasi anggaran.

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Angka tersebut juga mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya berupa anggaran untuk menghasilkan kinerja/target yang telah ditetapkan. Apabila sama atau dibawah 100%, maka dapat dikatakan efisien.

Berdasarkan perolehan capaian indikator kinerja dan anggaran pada tahun 2024, maka pada indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro PBW diperoleh tingkat efisiensi sebesar 89,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja telah **efisien**.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Nilai IKPA Biro PBW tidak dapat dilakukan karena indikator kinerja tersebut tidak menggunakan sumber daya anggaran.

Selanjutnya, untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan tingkat efisiensi yang diperoleh dari pembagian persentase capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 mencapai nilai 99,01%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja telah **efisien**.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma pada Tahun 2024 tidak terlepas dari implementasi program dan kegiatan yang dirancang dengan baik, yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja:

1. Kegiatan kontrak service pemeliharaan (Gedung dan Instalasi, RJA, dan Wisma DPR RI);
2. Kegiatan renovasi Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI;
3. Kegiatan renovasi ruang kerja Anggota DPR RI dan penataan ruang kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana gedung dan halaman DPR RI (pengecatan *dome*, pembuatan ruang delegasi, penggantian pagar belakang DPR RI, pengadaan *dry garden* acara kenegaraan);

5. Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana RJA DPR RI (penataan taman, perbaikan ruang fitness RJA DPR RI);
6. Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana Wisma DPR RI (pembuatan pagar jalan masuk wisma DPR RI, *landscape* pintu masuk DPR RI).

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran operasional Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma mencapai 99,98% atau Rp 735.721.000,- dari pagu sebesar Rp 735.900.000,-. Anggaran operasional tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain: perumusan bahan kebijakan, rapat koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pencetakan, mengundang narasumber, serta perjalanan dinas untuk monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Biro PBW Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	735.900.000	735.721.000	99,98%
2.	Bagian Gedung dan Instalasi	481.406.205.000	481.300.221.341	99,98%
3.	Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	78.415.472.000	78.259.667.434	99,80%
4.	Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI	50.073.610.000	50.021.811.571	99,90%
Total Realisasi Biro PBW		610.631.187.000	610.317.421.346	99,95%

Bagian Gedung dan Instalasi mempertahankan realisasi anggarannya. Realisasi anggaran Bagian Gedung dan Instalasi mencapai 99,98% atau Rp 481.300.221.341,- dari pagu sebesar Rp 481.406.205.000,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan antara lain untuk kontrak layanan gedung dan halaman, kontrak layanan mekanikal dan elektrikal, pemeliharaan gedung dan halaman (termasuk perbaikan ruang kerja Anggota, perbaikan sarana dan prasarana gedung, taman, dan renovasi toilet), serta pemeliharaan mekanikal dan elektrikal.

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan berhasil meningkatkan realisasi anggaran sebesar Rp 78.259.667.434,- atau 99,80% dari pagu sebesar Rp 78.415.472.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kontrak layanan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata dan Ulujami, perbaikan dan renovasi rumah dinas Pimpinan DPR RI dan Setjen DPR RI, perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan RJA, serta pemeliharaan mekanikal dan elektrikal di lingkungan RJA.

Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 50.021.811.571,- atau 99,90% dari pagu Rp 50.073.610.000,-. Bagian ini berhasil mengoptimalkan anggaran. Adapun anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk pekerjaan pembuatan pintu gerbang dan infrastruktur jalan masuk Wisma DPR RI, kontrak layanan pemeliharaan Wisma DPR RI, kontrak layanan Sistem Keamanan Wisma DPR RI, kontrak layanan delegasi, kontrak layanan genset Wisma DPR RI, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana Wisma DPR RI.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun 2024, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Keberhasilan ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 99,95%, yang merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Sasaran kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma pada Tahun 2024 adalah peningkatan kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Persentase Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma yang capaiannya sebesar 3,74%;
2. Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma yang capaiannya sebesar 87,24;
3. Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma yang capaian sebesar 99,95%.

Dari sisi output, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma pada Tahun 2024 telah berhasil menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma juga berhasil mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

4.2. Saran

1. Membentuk tim respons cepat untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI;
2. Mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai di Lingkungan Biro PBW Setjen DPR RI;
3. Menerapkan sistem kerja adaptif dan kolaboratif di lingkungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma guna mendukung tugas dan fungsi DPR RI;
4. Mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
5. Mengadakan program penguatan budaya kerja, seperti pelatihan layanan prima dan kampanye internal untuk meningkatkan semangat pelayanan publik;
6. Melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran.

LAMPIRAN





**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumaryandono, MPM.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku stasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Sumaryandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.
NIP. 19661008 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,33
		2. Nilai IKPA Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	96
		<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA 9,60 - Deviasi Halaman III DIPA 9,60 - Penyerapan Anggaran 24,00 - Belanja Kontraktual 9,60 - Penyelesaian Tagihan 14,40 - Capaian Output 28,80 	
		3. Persentase Realisasi Anggaran	99%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp619.956.127.000,00

Deputi Bidang Administrasi,

Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198810 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma,

Satyanto Pramobodo, S.E., M.Si.
NIP. 19661008 199403 1 003





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE: ww.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 2299/PR.05.04/XII/2024

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
 - b. bahwa penugasan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.
- Dasar** :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021;
 - e. Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: B/15334/PR.05.04/12/2024, Tanggal 6 Desember 2024, Perihal: Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dengan ini memberi tugas:

Kepada :

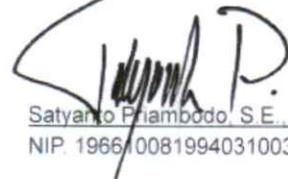
No.	Nama	Jabatan
1.	<u>Satyanto Priambodo, S.E., M.Si</u> NIP. 196610081994031003	Pengarah
2.	<u>Budiyarto, S.AP, M.AP</u> NIP. 197506221997031002	Penanggung Jawab
3.	<u>Adang Firmansyah, S.P., M.AP</u> NIP. 197511042005021001	Ketua
4.	<u>Sri Murti Nardani, S.E.</u> NIP. 196909051993022001	Wakil Ketua
5.	<u>Dina Khairani, S.T</u> NIP. 198506062018012001	Sekretaris

6.	<u>Eko Riswanto, S.E., M.AP</u> NIP. 197106011998031004	Anggota
7.	<u>Waluyo, S.E., M.AP</u> NIP. 197405271998031004	Anggota
8.	<u>Endang Komar, S.T., M.T</u> NIP. 197211101997031002	Anggota
9.	<u>Firosa Siresia, S.E.</u> NIP. 198210222003122001	Anggota

Untuk : Melaksanakan tugas menyusun Laporan Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Demikian surat tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 Desember 2024
Kepala Biro Pengelolaan Bangunan
dan Wisma,



Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.
NIP. 1966/0081994031003

